

## KEMANDIRIAN EKONOMI : MENGHAPUS SYSTEM EKONOMI SUBORDINASI MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT \*)

Sri Edi Swasono

Guru Besar FE-UI Jakarta, Penasehat Menteri PPN Bappenas  
Anggota Khusus Kajian Ekonomi Islam

### Abstract

*Our economy is not easy to build economic transformation and social transformation to change colonial economic to be national economic because of an ex-colonial law enforcement and an individualistic minded. Market mechanism have made market failure especially on keep the society's interest whose include under class, so it grows disempowerment and impoverishment.*

*Economic policy that enforce growth, but it doesn't expand an employment is not one of mindset of fundamentalism, but it had to be aware as the interest to dominate and force a national dependency.*

**Keywords:** Platform, economic and social transformation, self-interest, empowerment.

### Pendahuluan

Saat ini kemandirian ekonomi nasional telah menjadi tuntutan riil. Ketergantungan pada keterdiktean oleh pihak luar negeri digugat sebagai penyelewengan mendasar dari cita-cita kemerdekaan nasional, sekaligus memperpuruk martabat, prestise dan harga diri bangsa. Platform nasional tentang pinjaman luar negeri yang harus bersifat "sementara" dan "pelengkap" tidak ditaati lagi<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Mereka yang mengingkari gugatan ini kiranya terperangkap oleh sindrom "Ideologi Fatigue", menjadi coquettish dan latah dalam menyongsong de-ideologisasi yang penuh absurditas, lihat Sri Edi Swasono, Merubah Pakem : Mewaspada Pasar-Bebas, dari artikel 1988 (Surabaya : Pascasarjana Unair, 2001), hlm. 26. Perlu dikemukakan disini bahwa pada tahun 1970, selaku Staf Khusus Ketua Bappenas,

penulis bertugas untuk memimpin pengumpulan data sebagai persiapan awal penyusunan Repelita II. Kebetulan pada periode berikutnya penulis juga menjadi anggota Pokja GBHN pada Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, sebagai lembaga tunggal yang bertugas menyusun naskah resmi GBHN. Ada keterkaitan khusus antara Repelita II dan GBHN 1973 yang menyangkut pinjaman luar negeri. Pimpinan Bappenas dan Pimpinan Dewan Pertahanan Nasional berpegang pada satu platform nasional yang ditetapkan oleh Kepala Negara, yaitu bahwa "pinjaman luar negeri" merupakan "pelengkap dan bersifat sementara". Dibalik platform itu terpelihara suatu paham politik nasional, yaitu bahwa didalam pembangunan nasional ini yang kita bangun adalah rakyat, bangsa dan Negara. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah derivat dari paham politik nasional ini, artinya pembangunan ekonomi berkedudukan sebagai pendukung integral terhadap pembangunan rakyat, bangsa dan negara. Dari sini berkembang pemikiran strategis yang membedakan antara "pembangunan Indonesia" dengan sekedar "pembangunan di Indonesia" (juga antara "pembangunan ekonomi" dengan "pembangunan manusia seutuhnya"). Platform ini kemudian melembaga keseluruhan birokrasi, dan karena platform ini ditegaskan oleh GBHN, maka



Sejak awal kemerdekaan, kemandirian sejati telah tegas digariskan sebagai cita-cita nasional yang harus direalisasi, mewujudkan *onafhankelijkheid*, melepaskan diri dari ketergantungan. Selanjutnya pada awal Orde Baru, yang mewarisi kebangkrutan ekonomi Orde Lama, telah muncul ide mengenai perlunya kita memperoleh pinjaman dari luar-negeri untuk mengangkat perekonomian Indonesia. Bersamaan dengan itu muncul pula gagasan tentang bagaimana kita harus berhati-hati terhadap pinjaman luar-negeri. Misalnya di dalam penggarisan *Tracee Baru* diawal Orde Baru (1966) yang digagas oleh Universitas Indonesia, yang banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh dari Fakultas Ekonomi, sempat dikemukakan tentang syarat-syarat untuk menerima pinjaman luar-negeri, yang intinya menyangkut bunga rendah (bukan altruisme) tidak mengikat dan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan ekonomi yang masing-masing mampu mengembalikan sendiri hutang dan bunganya. *Tracee Baru* yang digelar dan dipelopori orang-orang FEUI masih tegas-tegas mempertahankan Deklarasi

Ekonomi (sebagai acuan politik) yang intinya adalah politik ekonomi “berdikari” atau “mandiri”.

### **Transformasi Ekonomi dan Transformasi Sosial**

Secara sadar sejak Indonesia merdeka dan menetapkan UUD 1945 telah dengan tegas digariskan kebijaksanaan nasional untuk melakukan “transformasi ekonomi” dan “transformasi sosial”

Dalam kehidupan ekonomi makna transformasi ekonomi berhakikat “merubah sistem ekonomi kolonial yang subordinatif menjadi sistem ekonomi nasional yang demokratis”. Para pendiri Republik dengan sangat bijaksana dan hati-hati menghindari kemungkinan terjadinya *chaos* dalam pelaksanaan transformasi ekonomi itu. Oleh karenanya ditetapkan Aturan peralihan (Ayat II) UUD 1945 yang berbunyi : “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung bertaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Dengan demikian maka berlakulah “dualisme” didalam sistem ekonomi nasional. Sistem pertama berdasarkan paham demokrasi ekonomi yang secara imperatif sesuai Pasal 33 UUD 1945 (yaitu paham ekonomi berdasar “kebersamaan dan asas kekeluargaan”, *mutualism dan brotherhood*); dan sistem kedua berdasar paham individualisme atau “asas perorangan” mengikuti

---

kemudian didalam GBHN 1988 *platform* ini dilepas, tidak lagi kita temukan arahan bahwa pinjaman luar-negeri merupakan pelengkap dan bersifat sementara. Memang sejak tahun 1988 kita mengenal maraknya semangat liberalisasi dan deregulasi. (*Platform* ini hilang dari GBHN bukan tanpa scenario).



berdasar paham individualisme atau "asas perorangan" mengikuti ketentuan *Wetboek van Koophandel* (KUHD) sesuai Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut.

Mengingat berlakunya sistem kedua (yang berdasar pada "asas perorangan") sesuai dengan aturan yang bersifat "temporer" itu, maka didalam menyusun sistem ekonomi nasional "asa perorangan" (yang menjadi dasar liberalisme dan hidupnya kapitalisme) seharusnya bersifat temporer pula. Dalam kaitan tugas transformasi ekonomi ini maka Negara secara imperatif harus memiliki komitmen tegas untuk menyusun perekonomian (kultur ekonomi dan bisnis) kearah paham ekonomi yang berdasar pada "usaha bersama dan asas kekeluargaan", kemudian menanggalkan paham ekonomi yang berdasar pada "asas perorangan". Dengan kata lain, transformasi ekonomi berarti secara bertahap kita mem-Pasal 33-kan KUHD.

Ada alasan hukum, yaitu masih dipertahankan berlakunya asas perorangan sesuai ketentuan Aturan Peralihan (Ayat II) UUD 1945, yang juga mengakibatkan kita mudah bersambung dan terdikte oleh kekuatan ekonomi dari luar yang berdasarkan individualisme, liberalisme dan kapitalisme, yang saat ini dengan deras dibawa oleh gelombang globalisasi. Sementara itu sistem ekonomi pasar bebas (berdasar *market fundamentalism*) adalah

sistem yang memelihara dan mempertahankan tuntutan kultur ekonomi kapitalisme dahsyat yang eksploitatif dan predatori.

Dalam pada itu keterdiktean, ketertundukan, ketakmandirian dan ketergantungan ekonomi terus berkelanjutan dengan tetap langgengnya budaya ekonomi subordinasi, yang mempertahankan hegemoni ekonomi dan menumbuhkan dependensi baru.

Hubungan ekonomi subordinasi tuan-hamba, *taoke-koelte* atau juragan-buruh (suatu *economic slavery system* sebagaimana berlaku pada zaman usaha VOC, pasca VOC, *cultuurstelsel* dan pasca *cultuurstelsel*) secara imperatif perlu kita ubah menjadi hubungan ekonomi yang demokratis, yaitu hubungan ekonomi yang partisipatori-emansipatori. Inilah transformasi sosial yang harus kita lakukan. PIR (Perkebunan Inti Rakyat) adalah *cultuurstelsel* baru. PIR bukan lagi sesuai dengan NES (Nucleus Estate Small-Holders) sebagai model *empowerment* aslinya, dimana *inti* seharusnya dimiliki (sebagian/seluruhnya) oleh *plasma*, dimana hubungan keduanya adalah kebersamaan, *inti* tidak mensubordinasi *plasma* seperti kenyataannya sekarang.

Transformasi sosial ini tidak mudah terlaksana. Transformasi sosial ternyata harus menempuh suatu proses budaya melalui pertentangan kepentingan



dengan budaya feodalistik (patronisasi) dan servilisme (keinlanderan) yang tidak mendukungnya. Dalam kaitan dengan percaturan ekonomi antar negara hubungan ekonomi subordinasi sangat diwarnai oleh persistensinya *inferiority complex* bangsa ini, suatu budaya hidup yang tidak cerdas, penuh rasa minder, ketertundukan dan kekaguman kepada yang serba Barat dan Asing. Dengan demikian melunturnya nasionalisme, maka hubungan ekonomi subordinasi ini hidup kembali dan sekaligus makin memperpuruk bangsa Indonesia

Apakah keterpurukan seperti yang disinggung diatas berarti pula bangsa ini telah mengingkari “nasionalisme” sebagai kekuatan dahsyat yang *inherent* dan aktual, sebagai penggerak utama perkembangan ekonomi nasional, sebagaimana ditegaskan sebagai suatu kenyataan riil oleh Joan Robinson, Leah Greenfeld, dan Lustic dst<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Mengenai nasionalisme dapat saya kutipkan: “... *The very nature of economics is rooted in nationalism... The aspirations of the developing countries are more for national independence and national self-respect than just for bread to eat... The hard-headed Classical were in favor of Free Trade because it was good for Great Britain, not because it was good for the World...*” lihat Joan Robinson, *Economic Philosophy*, Chicago: Aldine Publishing, 1962; “... *Today, it is claimed, we live in the period of late capitalism, and possibly in the post industrial society, yet nationalism... is not gone, nor does it show any signs of being gone soon... Nationalism first appeared in England, becoming the preponderant vision of society there... the sustained growth characteristic of modern economy is not self-sustained; it is stimulated and sustained by nationalism...*” lihat Leah

sebagaimana saat ini tetap merupakan kenyataan riil? Nasionalisme baru tetap menolak dependensi, namun mendorong interdependensi global, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggung jawab global.

### Strukturalisme Ekonomi : Paradigma Baru

Keterpurukan Indonesia tidak terlepas dari peran kelompok *mainstream* yang saat ini mendominasi pemikiran kaum ekonomi Indonesia, padahal basis teori neoklasikal yang melandasi pemikiran mereka saat ini terperangkap kedalam konservatisme dan konvensionalisme, yang boleh dibilang makin absolut dan ortodoks.

Konservatisme dan ortodoksi ilmu ekonomi *mainstream* telah dengan keras ditentang oleh kaum strukturalis yang telah membuktikan asumsi dasar ekonomi neo-klasikal yang berdasar *self-interest* tidak lagi valid, bahkan telah membentuk akhlak ekonomi yang makin jauh dari hakikat ilmu ekonomi sebagai *a moral science*. Dari asumsi itu telah terjadi suatu *self-fulfilling*

Greenfeld, *The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2001; “... *It has been a commonplace to view nationalism as the greatest, the most powerful single force in the modern world...*”, lihat Ian S. Lustick, *Hegemony and The Riddle of Nationalism*, Logos 1.3 – Summer 2002, hlm. 18.



dari hakikat ilmu ekonomi sebagai *a moral science*. Dari asumsi itu telah terjadi suatu *self-fulfilling prophesy* yang menciptakan *mindset* ekonomi dan membentuk para pelaku ekonomi benar-benar menjadi *homo-economicus*, meninggalkan moralitasnya sebagai *homo-ethicus*. Ilmu ekonomi akhirnya berada dalam suatu berantakan (*turmoil*)<sup>3</sup>. Fundamentalisme pasar, sebagai inherensi asumsi dasar *self-interest*, mempergiat keterjerumusan ini<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Lester C. Thurow, Guru Besar Ekonomi pada MIT menegaskan: "... *economics is in the state of turmoil... the economics of the textbooks and of the graduate schools and not only still teach price-auction model but it is moving toward narrower interpretations... the mathematical sophistication intensifies as an understanding of the real world diminishes... economics cannot do without simplifying assumptions, but the trick is to use the right assumption at the right time, and this judgement has to come from empirical analyses including those employed by historians, psychologists and political scientists...*", lihat Lester C. Thurow, *The Dangerous Currents: The State of Economics* (New York: Random House, 1983), hlm. 263-237

<sup>4</sup> Robert Heilbroner salah satu tokoh besar Amerika Serikat dalam ilmu ekonomi dan Lester C. Thurow secara konsisten menegaskan mengenai the defects of the market sebagai berikut: "... *the market is an insufficient instrument for provisioning society, even rich societies... the market is assiduous servant of the wealthy, but indifferent servant of the poor... market system promote amorality, it is not just an economic failure, but it is a moral failure...*", lihat Robert Heilbroner dan Lester C. Thurow, *Economic Explained* (New York: Simon Schuster, edisi baru, 1994), hlm. 255-256, sementara itu George Soros mengatakan: "... *But market fundamentalism has become so powerful that any political forces that dare to resist it are branded as sentimental, illogical, and naive... Yet the truth is that market fundamentalism is itself naive and illogical. Even if we put aside the bigger moral and ethical question and concentrate solely on the economic arena, the*

Kelompok *mainstream* menjadi identik dengan kelompok *market fundamentalists*.

Tantangan kita adalah tantangan budaya, yaitu merombak paradigma obsolit dalam pemikiran ekonomi untuk membentuk suatu *mindset* ekonomi baru yang menjamin kemandirian.

Pandangan strukturalistik yang diungkapkan oleh John Kenneth Galbraith, kiranya baik untuk mengawali titik-tolak tentang kelemahan ekonomi pasar. Galbraith menyatkan bahwa internasionalisasi modal, produksi dan perdagangan yang bebas sebagai wujud utama dari globalisasi, akan menimbulkan pemberdayaan ekonomi dan politik (*empowerment*) bagi kalangan aktor ekonomi yang mampu atas korban *the underclass*, yaitu golongan kelas bawah yang hidup dalam ekonomi rakyat.

Paham strukturalisme, baik strukturalisme awal maupun neostrukturalisme, adalah paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial-ekonomi. Kaum strukturalis mengungkapkan dan mengusut

---

*ideology of market fundamentalism is profoundly and irredeemably flawed. To put the matter simply, market forces, if they are given complete authority even in the purely economic and financial arenas, produce chaos and could ultimately lead to the downfall of the global capitalist system. This is the most important practical implication of my argument in this book...*"; lihat George Soros, *The Crisis of Global Capitalism* (New York: Public Affairs, 1998), hlm, xxii



ketimpangan distribusi pendapatan, produktivitas dan kesempatan ekonomi. Kepedulian akademik-ilmiah pemikir strukturalis meliputi pula masalah ketimpangan dalam kelembagaan, partisipasi dan emansipasi sosial-ekonomi, pengangguran, kemiskinan struktural dan masalah ketergantungan serta subordinasi sosial-ekonomi.

Kaum strukturalis menempatkan ilmu ekonomi pada peran normatifnya, menjelajahi komposisi dan interrelasi antara para aktor, sektor-sektor dan variable-variable ekonomi dalam rangka perwujudan keadilan dan kesetaraan sosial-ekonomi. Apabila strukturalisme cenderung menolak mekanisme pasar bebas adalah karena pasar bebas secara inheren menumbuhkan ketidakadilan sosial-ekonomi. Demikian itulah maka strukturalisme banyak menggelar tuntutan transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang harus dianggap *inherent* dalam proses pembangunan nasional. Dalam kaitannya dengan ancaman dominasi dan hegemoni kekuatan ekonomi global, maka dapatlah dipahami bahwa strukturalisme berkaitan erat dengan nasionalisme ekonomi.

Kelompok ekonomi "moneteris" kebanyakan beranjak dari pemikiran neoklasikal (*market fundamentalism*), sedangkan kelompok ekonomi "sektor riil" lebih dekat dan memahami

pemikiran, tetapi tidak selalu rukun dengan kaum strukturalis.

Selanjutnya kaum strukturalis, yang mengoreksi kelemahan mendasar dari mekanisme pasar dan persaingan-bebas. Dengan makin bergelornya globalisasi dengan kapitalisme globalnya, makin gencar pula menunjukkan kebenaran analitik dan bukti-bukti empirik, betapa globalisasi benar-benar perlu diwaspadai. Kaum strukturalis mulai menggunakan istilah-istilah keras untuk menyentak *mindset* neoklasikal, seperti "global capitalism", "turbo capitalism", "new imperialism", "cowboy capitalism", "Old West capitalism", "the dangerous currents", "the winner-take-all market", "the zero-sum society", "the winner-take-all society", dst. Jan Tinbergen mengatakan kepada saya (1992) bahwa lobang *ozone* makin besar karena kelakuan "the greedy capitalism". Dalam platform Club of Rome, lebih lanjut Tinbergen mengatakan bahwa "the limits to growth" dalam 20 tahun menjadi "beyond the limits" karena kerakusan kapitalisme global.

Kaum strukturalis tidak saja menunjukkan kelemahan (parsialitas) ekonomi neoklasikal, tetapi juga mengoreksi dan bahkan menolak asumsi dasarnya. Kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar dalam mewujudkan *the invisible hand* (yang diabaikan oleh kaum *market*



ketidaksempurnaan pasar dalam mewujudkan *the invisible hand* (yang diabaikan oleh kaum *market fundamentalists*) adalah yang salah satunya, tidak terselesaikannya *micro-macro rift* adalah yang lainnya, sehingga efisiensi ekonomi yang dikembangkan berdasar tataran mikro tidak klop, bahkan bisa bertentangan dengan efisiensi ekonomi pada tataran makro.

Ekonomi neoklasikal berdasar mekanisme persaingan pasar bebas terbukti tidak mampu mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural untuk terlaksananya transformasi sosial yang bermakna. Oleh karena itu strukturalisme berorientasi pada strukturisasi dan restrukturisasi ekonomi disertai intervensi mengatur dan mengontrol mekanisme pasar. Kelemahan mekanisme pasar bebas dalam perwujudan demokrasi ekonomi adalah (istilah saya) mungkin sekedar mampu menghasilkan "nilai tambah ekonomi" tetapi tidak menjamin dapat menyumbangkan "nilai tambah sosial-kultural" (menjangkau makna partisipasi dan emansipasi kemartabatan), dan pula timpangnya struktur kekuasaan ekonomi, telah menjadi tema-tema utama dalam pemikiran ekonomi strukturalis.

Strukturalisme peduli akan harkat manusia dalam lingkup moralitas ekonomi. Strukturalisme menolak *homo economicus* yang melahirkan akhlak *homo homini lupus*, menolak eksploitasi,

pelumpuhan (*disempowerment*) dan pemiskinan (*impoverishment*) sosial-ekonomi. Apabila ekonomi neoklasikal berorientasi pada pertumbuhan (*growth*), maka ekonomi strukturalis lebih mengutamakan masalah redistribusi dan lapangan kerja (*employment*). Boleh dibilang, sebagai upaya mengubah *mindset* atau pakem ekonomika, awal dari strukturalisme terutama adalah pemikiran kearah "*it is employment that will take care of growth*".

Bagi Indonesia, pemikiran-pemikiran strategis, cermat dan mendalam mengenai ketimpangan-ketimpangan struktural harus tetap dikembangkan. Hanya dengan demikian maka kebijakan restrukturisasi untuk mengatasi ketimpangan struktural dapat didesain. Saya menawarkan beberapa butir kebijakan restrukturisasi ekonomi dalam artian reformasi makro yang meliputi berbagai sektor, bidang dan dimensi a.l. seperti berikut : (1) Restrukturisasi pemilikan dan penguasaan aset ekonomi : Pemilikan dan penguasaan aset oleh rakyat harus makin merata dan dapat mengurangi secara struktural konsentrasi-konsentrasi pemilikan dan penguasaan aset pada sekelompok kecil actor-aktor ekonomi. Setiap usaha ekonomi harus dapat meningkatkan pemilikan bukan sekedar meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. Restrukturisasi ini diarahkan untuk



implementasi demokratisasi ekonomi didalam badan-badan usaha ekonomi (lihat Bagan II). Dalam restrukturisasi ini hendaknya dihindarkan suatu perampasan seperti (*"savage acquisition"*, *"cannibal redistribution"* atau *"wild take-over"*). (2) Restrukturisasi alokatif: Menyangkut alokasi dana-dana pembangunan, baik dana anggaran nasional ataupun daerah, baik yang berasal dari perbankan ataupun dari lembaga-lembaga non-bank. Bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan non-bank harus tetap memelihara perannya sebagai agen pembangunan, agen reformasi dan agen restrukturisasi kearah tercapainya keseimbangan strukturual yang lebih baik. (3) Restrukturisasi spasial (*spatial*): Restrukturisasi ini diperlukan antara lain untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan pembangunan serta pertumbuhan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, antara Jawa dan luar Jawa, antara perkotaan dan pedesaan, dan seterusnya. (4) Restrukturisasi sektoral: Hal ini diperlukan terutama untuk mencapai keseimbangan dinamis antara sektor industri dan sektor pertanian, antara sektor formal-modern dan sektor informal-tradisional, antara sektor-sektor yang *grassroots-based* dan yang *non-grassroots-based*, menuju kukuhnya perekonomian rakyat (dengan wadah koperasi) sebagai sokoguru

perekonomian nasional. (5) Restrukturisasi perpajakan: selain berperan sebagai sumber penerimaan negara, pajak adalah sarana redistribusi. Pada dasarnya pajak harus progresif untuk mempersempit kesenjangan. Khususnya terhadap kekayaan dan pemilikan barang mewah harus dikenakan pajak kekayaan secara progresif. Sebaliknya terhadap kelompok miskin yang memerlukan pemberdayaan diberikan subsidi atau proteksi. Pajak merupakan insentif untuk kegiatan produktif dan disinsentif terhadap konsumsi mewah. (6) restrukturisasi strategis: restrukturisasi ini untuk memperkuat kemandirian ekonomi, mengurangi dependensi dan meningkatkan interdependensi resiprokal yang seimbang dan diperlukan untuk memperkuat fundamental ekonomi. Dengan restrukturisasi strategis ini perekonomian nasional diarahkan untuk berakar didalam negeri dan menjadi *people-centered* dan *resources-based*. (7) restrukturisasi pola pikir atau reorientasi budaya: GBHN telah mendorong reorientasi semacam ini, yakni antara lain reorientasi kearah lebih banyak membuka akses akan hak-hak rakyat dan mengembangkan perekonomian rakyat melalui sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi. (8) restrukturisasi social politik dan social budaya: restrukturisasi ekonomi tidak akan sepenuhnya bermanfaat apabila tidak didukung oleh restrukturisasi



restrukturisasi ekonomi tidak akan sepenuhnya bermanfaat apabila tidak didukung oleh restrukturisasi dibidang social politik dan social budaya. Restrukturisasi social politik menyangkut demokratisasi politik dan peran masyarakat madani. Restrukturisasi social budaya menyangkut upaya mengubah *mindset*, melakukan *unlearning* terhadap pakem-pakem usang, khususnya restrukturisasi dan demokratisasi pendidikan rakyat.

Sementara itu Sritua Arief salah satu tokoh strukturalis utama Indonesia mengecam ilmu ekonomi neoklasikal yang menjadi roh globalisasi, dengan menegaskan bahwa ia menentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pasar bebas dalam ruang lingkup internasional yang tidak adil dan bahwa pasar harus diintervensi

Saya sendiri telah memberikan gambaran betapa kita harus mewaspadaai globalisasi meskipun kita tidak harus menolaknya, saya kemukakan paling tidak ada tiga kelompok yang mempunyai pandangan berbeda mengenai globalisasi yang harus kita perhatikan dengan cermat: (1) Kelompok pengagum; (2) Kelompok kritis dan obyektif; (3) Kelompok yang menolak. Saya sendiri cenderung untuk memihak kelompok ketiga dalam arti mewaspadaai dan bersikap sangat hati-hati terhadap kelompok pertama dan kedua

### Ideology Kerakyatan dan Ekonomi Rakyat

Berkali-kali Mubyarto dan saya mengingatkan bahwa pengajaran ilmu ekonomi di kampus-kampus telah "keliru". Saya telah menegaskan tentang keterperosokan kita kedalam perangkap teoritikal-parsial dan yang menerima begitu saja asumsi dasar neoklasikal yang mengacu pada pola pemikiran ekonomi Barat yang sempit dan mengandung berbagai ortodoksi.

Di paragraph depan telah saya kemukakan mengenai Pasal 33 UUD 1945 dan tugas pelaksanaan cita-cita transformasi ekonomi dan transformasi social. Proses transformasi ini tidak akan bisa dilakukan apabila beberapa butir perintang tidak terlebih dulu kita atasi, antara lain : (1) asas perorangan dengan paradigma individualisme dan liberalisme yang mengutamakan kepentingan individu (*self-interest economics* yang berpedoman *free-competition* dan *market fundamentalism*); (2) asas kebersamaan dan kekeluargaan berdasar paham kerakyatan (demokrasi ekonomi), dimana kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-perorangan (tanpa mengabaikan hak orang-perorangan); (3) Negara melepaskan diri dari tugasnya sebagai *agent of development* dan *agent of reformation* dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan structural (percaya pada *the invisible hand* yang da'am



hand); (4) mewaspadaikan globalisasi dengan ide pasar bebas dan *boderless world*-nya;

Untuk itu marilah kita mulai menegaskan lebih dahulu, siapa yang disebut “rakyat”?

Pertanyaan semacam ini banyak dikemukakan secara sinis oleh sekelompok pencemooh yang biasanya melanjutkan bertanya, “bukankah seorang konglomerat juga rakyat? Tentu ia bagian dari rakyat! Namun yang jelas perekonomian konglomerat bukanlah perekonomian rakyat.

“Rakyat” adalah konsepsi politik, bukan konsepsi arimatik dan statistic, rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah “*the common people*”, rakyat adalah “orang banyak”. Pengertian rakyat berkaitan dengan “kepentingan public”, yang berbeda dengan “kepentingan orang-seorang”. Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Ada yang disebut “*public interest*” atau “*public wants*”, yang berbeda dengan “*private interest*” dan “*private wants*”. Sudah lama pula orang mempertentangkan antara “*public needs*” (yang berdimensi domain public) dan “*individual privacy*”. Ini analog dengan pengertian bahwa “preferensi social” berbeda dengan hasil penjumlahan atau gabungan dari “preferensi individual”. Istilah “rakyat” memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat “public” itu.

Mereka yang tidak mampu mengerti “paham kebersamaan” (*mutualism/mutuality*) dan “asas kekeluargaan” (*brotherhood/broederschap/ukhuwah*) pada dasarnya karena mereka tidak mampu memahami arti dan makna luhur dari istilah “rakyat” itu, tidak mampu memahami kemuliaan adagium “*vox populi vox Dei*”- suara rakyat suara Tuhan, dimana rakyat lebih dekat dengan arti “masyarakat” atau “*ummat*”, bukan dalam arti “penduduk” yang 210 juta. Rakyat atau “*the people*” adalah jamak, tidak tunggal. (Ideologi kerakyatan saat ini harus berhadapan dengan adagium baru politik uang “*vox populi vox argentums*”- suara rakyat suara uang).

Seperti dikemukakan diatas, kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamakan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi nasional kita berlaku demokrasi ekonomi, yang tidak menghendaki “otokrasi ekonomi”, sebagaimana pula demokrasi politik menolak “otokrasi politik”.

Konsep pembangunan ekonomi rakyat sebenarnya sangat jelas bagi yang masih berkeinginan mengetahuinya serta bersedia melepas pola-pikir lama yang terbukti “*bias*”, dengan melakukan *unlearning* secara wajar menuju



terbukti "*bias*", dengan melakukan *unlearning* secara wajar menuju pemikiran reformatif. Titik tolaknya adalah "mengabdikan rakyat", bukan "mengabdikan ilmu" semata. Ilmu harus bisa ditawarkan dengan misi. Ilmu yang kita kuasai kita kembangkan dan kita abdikan kepada rakyat dan kepentingannya.

Pemilihan (altruisme) saja kepada ekonomi rakyat tidaklah cukup, kita harus meyakini pula bahwa ekonomi rakyat memiliki kekuatan sebagai strategi pembangunan.

Memang ekonomi rakyat penting untuk mendapat perhatian khusus dari kita. Bukankah dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda perekonomian besar (ekonomi konglomerasi) ekonomi rakyat ternyata tetap bertahan? Bukankah kita harus bersyukur bahwa dengan terpuruknya ekonomi besar, ekonomi rakyatlah yang ternyata memberi penghidupan dan pekerjaan kepada rakyat. Untuk itu saya ingin mengatakan : "untunglah ada ekonomi rakyat". Dengan demikian itu kehidupan ekonomi rakyat tetap tersangga dan terjamin.

Ekonomi rakyat adalah riil dan konkrit. Kita bisa bersilang pendapat mengenai definisi ekonomi rakyat. Oleh karena itu lebih tepat apabila kita meninjaunya dari segi kenyataan yang ada secara sederhana, melalui *common sense*, yaitu bahwa kita memiliki pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan

rakyat, tambak rakyat, pelayaran rakyat, kerajinan rakyat, industri rakyat, penggalian rakyat, pertambangan rakyat, pertukangan rakyat, bahkan yang teramat penting bagi kehidupan sehari-hari adalah bahwa kita memiliki dan hidup dari pasar-pasar rakyat. Kita kenal pula ekonomi rakyat yang berbasis komoditi seperti kopra rakyat, kopi rakyat, karet rakyat, cengkeh rakyat, tembakau rakyat, dst. Yang menjadi penyangga/sokoguru bagi industri prosesing di atasnya. Ini semua memberikan lapangan pekerjaan dan sumber kehidupan yang sangat luas kepada masyarakat. Membangun ekonomi rakyat adalah membangun usaha-usaha rakyat yang riil seperti tersebut di atas

Apabila kita mengingat betapa besarnya BLBI dan Obligasi Rekap yang dikeluarkan pemerintah kepada konglomerat hitam, betapa tidak adilnya MSAA yang mejadi sumber hukum bagi pengampunan hutang (keputusan memberikan R&D bagi para penyamun BLBI), memang kita cenderung untuk terpaku pada pola pikir "perlunya pemihakan" mulai diberikan kepada ekonomi rakyat. Namun pemihakan (altruisme) saja kepada ekonomi rakyat tidaklah cukup. Kita harus meyakini pula bahwa ekonomi rakyat memiliki peran dan kekuatan sebagai *strategi pembangunan*

Makna sebagai strategi pembangunan itu, antara lain : (1) Dengan rakyat yang secara



ekonomi akan lebih menjamin nilai tambah ekonomi optimal yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Pemerataan akan terjadi seiring pertumbuhan. (2)

Memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat lebih secara konkrit menjadi asset aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dan kehidupan ekonominya merupakan investasi ekonomi nasional, merupakan *human investment* (bukan pemborosan atau *inefficiency*) dan mendorong tumbuhnya kelas menengah yang berbasis *grassroots*. (3)

Pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri (*self-empowering*), sehingga rakyat mampu meraih "nilai tambah ekonomi" dan sekaligus "nilai tambah sosial" (nilai tambah kemartabatan). (4) Pembangunan ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan rakyat akan merupakan peningkatan *collective bargaining position* untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan subordinasi ekonomi terhadap rakyat. (5) Dengan rakyat yang lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi maka nilai tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi didalam negeri dan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri. (6) Pembangunan ekonomi

rakyat akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber-sumber alam dalam negeri yang tersedia (*factor-endowment* Indonesia) berdasar strategi *resources based* dan *people centered*. (7) Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyerap tenaga kerja. (8) Pembangunan ekonomi rakyat akan bersifat lebih *quickly-yielding* dalam suasana ekonomi yang sesak napas dan langka modal. (9) Pembangunan perekonomian rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional akan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam negeri pada ekonomi luar negeri, akan menekan sebanyak mungkin ketergantungan akan *import-components* dan meningkatkan *domestic-contents* industri dalam negeri, yang selanjutnya akan lebih mampu menggerakkan pasaran dalam negeri. (10) Pemberdayaan perekonomian rakyat yang akan lebih mampu memperkukuh pasaran dalam negeri yang akan menjadi dasar bagi pengembangan pasaran luar negeri (ekspor). (11) Dalam globalisasi ini kita harus tetap waspada terhadap paham globalisme yang cenderung menyingkirkan paham nasionalisme. Kepentingan nasional Indonesia harus tetap kita utamakan sebagaimana Negara-negara adidaya selalu mempertahankannya pula dengan berbagai dalih ekonomi dan politik. Pembangunan perekonomian rakyat akan menjadi akar bagi penguatan fundamental



perekonomian rakyat akan menjadi akar bagi penguatan fundamental ekonomi nasional dan menjadi dasar utama bagi realisasi nasionalisme ekonomi. (12) Pembangunan perekonomian rakyat dapat dilaksanakan (*implementable*) tanpa mempergunjingkan ekstremitas positif-negatifnya peran dan mekanisme pasar. (13) Pembangunan perekonomian rakyat merupakan misi politik dalam melaksanakan demokratisasi ekonomi sebagai sumber rasionalitas dan pemihakan terhadap rakyat kecil. (14) Satu dekade yang lalu ada ajakan untuk meninjau ulang strategi-strategi pembangunan (*Development Strategies Reconsidered*, Overseas Development Council, 1987) dan ajakan yang mutakhir (*The Frontier of Development Economics*, Meier & Striglitz, 2001) menegaskan betapa perlu ada *shift of paradigms* dalam pemikiran ekonomi. Perekonomian rakyat memperoleh tempat dalam rekonsiderasi disitu. Lebih ddari itu, bagi mereka yang masih mau melepaskan ortodoksi perlu membaca ide-ide lama dan baru mengenai *social market economy*. (15) Secara keseluruhannya, butir-butir tersebut diatas akan lebih menjamin terjadinya pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indonesia. (16) Pembangunan ekonomi kerakyatan bertumpu pada *platform* bahwa yang kita bangun adalah rakyat, bangsa dan Negara.

(17) Dalam kenyataan, ekonomi rakyat telah menghidupi sebagian terbesar dari rakyat Indonesia, ditengah-tengah pasang surutnya sector perekonomian formal modern, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Kesemuanya mendukung percepatan upaya melaksanakan transformasi ekonomi dan transformasi social

Gerakan Koperasi Internasional (ICA), ILO dan Setjen PBB justru sedang menegaskan ulang tentang pentingnya koperasi untuk memajukan *grassroots economy*, khususnya ekonomi rakyat. Bahkan Konvensi PBB 2001 (sebagai hasil Sidang Umum-nya) menetapkan pula koperasi sebagai wadah *grassroots economy* diseluruh dunia perlu didorong maju berkat tiga prestasi utamanya yang telah dibuktikan, yaitu dalam (1) memberantas kemiskinan; (2) menciptakan lapangan kerja secara substantive; dan (3) memperkuat integrasi social (yang artinya memperkuat solidaritas social). Sementara itu, dunia saat ini mulai banyak bicara mengenai *world solidarity* dan *world equality*.

Saying sekali Indonesia, karena terbenam dalam *dept-trap* dan *cultural-trap*, malahan menjadi mudah kagum terhadap ide liberalisme dan privatisasi, serta terbawa arus pemikiran mentah kapitalisme global. Dalam hal ini saya ingin memperingatkan, agar kita menolak privatisasi dan mengutamakan "go-public" demi



demi kemuliaan rakyat : Mengapa Indosat dijual keasing, padahal Indosat bisa dimiliki oleh para pelanggan ponsel yang pasti mampu membelinya. Mengapa Semen Gresik hendak dijual keasing pula, padahal baik para *developers* dalam negeri maupun para pemilik toko material dalam negeri mampu membeli saham Semen Gresik; Pemda-Pemda pun bisa diatur dan dibantu untuk mampu memiliki Semen Gresik (daripada uang dihamburkan untuk membiaya *Release & Discharge* bagi para pengusaha hitam). Mengapa pula BCA dan lain-lain bank dijual keasing, padahal bisa dibeli oleh para nasabah. Tentu kita bertanya mengapa Indofood tahu-tahu sebagian sahamnya telah dimiliki asing, padahal seharusnya dijual kepada rakyat (para konsumen dalam negeri) yang dengan setia telah membesarkan dan menjadi pelanggan Indofood. Inilah peran Pemerintah yang harus melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 kedalam dimensi perkoperasian, karena dengan demikian itu *pemilik* Indosat, Semen Gresik, BCA, Indofood adalah para *pelanggannya* sendiri. Bukankah ciri utama koperasi adalah bahwa *pemilik* adalah sekaligus *pelanggan*? Macam inilah yang kita cita-citakan sebagai transformasi ekonomi dan transformasi social, sebagai peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat dalam kehidupan social ekonomi. Inilah konsep *Triple-C'o* yang saya ajukan diatas,

dimana pemilikan asset nasional tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat, tetapi merata dalam wujud *co-ownership*, *co-determination*, dan *co-responsibility* yang melibatkan masyarakat seluas-luasnya, meningkatkan pemilikan (*wealth*) dan partisipasi rakyat serta mengangkat harkat martabatnya, dari martabat sebagai kuli atau buruh menjadi mitra usaha

### Penutup

Kita telah menghadapi tidak saja *debt-trap* tetapi *culture-trap*. Kita tidak mudah melakukan transformasi ekonomi dan transformasi social dalam rangka merubah ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional karena kita terbelenggu oleh peraturan hukum ex-kolonial dan pola pikir individualistik, serta lengah mewujudkan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam kehidupan ekonomi. Padahal individualisme dalam wujud *self-interest* telah mendapat tentangan, baik secara moral maupun teoretikal didalam perkembangan ilmu ekonomi baru. Paham fundamentalisme pasar mendapat banyka kecaman pula, tidak saja dari segi moralitas tapi juga dari segi teknis dan teoretikal. Pasar mengemban ketidakmampuan untuk mendukung kepentingan ekonomi masyarakat, cita-cita pemerataan dan keadilan.



ekonomi masyarakat, cita-cita pemerataan dan keadilan. Mekanisme pasar banyak membuktikan kegagalan-kegagalannya (*market failure*) terutama dalam menjaga kepentingan mereka yang lemah daya belinya, sehingga pasar bebas dengan persaingan bebas yang mengiringinya telah memojokkan pihak yang lemah (*the under class*) menumbuhkan *disempowerment* dan *impoverishment*). Globalisasi yang berseiringan dengan pasar bebas dan persaingan bebas adalah kemasan baru dari kegiatan *homo economicus* multinasional, dengan insting dasarnya yang predatoris dan hegemonik, dan mengemban paham *homo homini lupus* dalam wajah indah yang canggih

Persaingan (*competition*) dan kerjasama (*cooperation*) adalah kekuatan kembar yang menggerakkan dunia. Ilmu ekonomi neo-klasikal memperoleh cap sebagai ilmu parsial (terkapsul) karena mengabaikan kerjasama kedalam *theory building* dan *academic teaching*. Padahal kehidupan lebih banyak ditandai dengan kedamaian, tidak selalu diisi dengan perang. Ilmu ekonomi pasar bebas dengan persaingan bebas menciptakan suatu *restless society*, padahal dengan kerjasama akan lebih terjamin terbentuknya suatu *peaceful society*. Krugman, Thurow dan Soros mulai mengecam obsesi persaingan yang menumbuhkan perang dagang global.

Keterjebakan Indonesia didalam hutang luar negeri tidak terlepas dari hegemonisme dan berkembangnya imperialisme baru. Kita melihat bukti yang amkin nyata dari hari ke hari terjadinya *disempowerment* terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kita menyaksikan pula bahwa yang terjadi saat ini pembangunan *di* Indonesia dan bukan pembangunan Indonesia. *Disempowerment* ini berkelanjutan dengan makin dibiarkannya pengangguran dan kemiskinan rakyat makin meluas. Kebijakan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan dan mengabaikan perluasan lapangan kerja bukanlah hanya satu kelengahan (*mindset* dari kelompok *market fundamentalism*), tetapi patut diwaspadai sebagai suatu kepentingan untuk mendominasi dan melanggengkan ketergantungan nasional. Kelompok ekonomi *mainstream* Indonesia tidak saja lengah misi tetapi juga lengah budaya. Paham *mainstream* mereka telah menjadikan mereka sebagai tawanan empuk dan target pelumpuhan. Terbentuklah masyarakat komprador dalam gerakan hegemonik terhadap Indonesia ini.

Saya menyadari sulitnya merubah suatu *mindset*, termasuk apa yang saya alami (di Bappenas) sendiri, yaitu tidak mudah meyakinkan bahwa target "meningkatkan kemandirian" atau "mengurangi ketergantungan" harus berada diatas target



populis ini: "let us take care of employment, employment will take care of growth". Syukurlah gerak terjadinya pergeseran paradigma ke arah yang positif ini mulai dirasakan.

Sebagai contoh konkrit, Menteri PPN/Bappenas berulang kali telah mengemukakan dan akan saya ulangi disini, agar kita melaksanakan keputusan rakyat, yaitu Tap MPR No. VI/2002, untuk segera mengakhiri kerjasama IMF. Kita melunasi hutang kita dengan cadangan devisa yang telah cukup banyak. Jumlah uang pelunasan ini murah nilainya jika dibandingkan dengan apa yang akan kita peroleh kembali dari tangan mereka (IMF), yaitu kebebasan dalam bertindak untuk menentukan sendiri apa yang terbaik bagi diri kita, secara strategis dan terhormat.

Membiarkan dilanggarnya TAP MPR itu, dengan segala siasat dan cara-cara tersembunyinya, berarti membiarkan bebas Bergeraknya *political villains* seperti yang digambarkan oleh Jose Ortega y Gasset (1939) dalam *La Rebelion de las Masas* – tentang bangkitnya pembangkang-pembangkang (liar), yang menjadi penguasa negara tanpa visi dan misi (kecuali misi kelompok kepentingan), yang orang Belanda menerjemahkannya (1954) sebagai *De Opstand der Horden*. Hal itu menjadi kenyataan, dan kita masuk kedalam awal dari bencana nasional yang besar.

Sebagai penutup akan saya ungkapkan disini sikap Presiden Sukarno yang terpaksa menyatakan keluar dari PBB dan IMF dan mengatakan "go to hell your aid", yang terlepas dari masalah ini

Presiden Soeharto yang membubarkan IGGI pada tahun 1992 karena membela harga diri bangsa dan rasa berdaulat serta menolak keterdiktean pula. Sikap Menteri Pronk yang seenaknya menginterpretasikan pelaksanaan HAM di Indonesia menjadi sebab utamanya. Memang ironis, IGGI lahir karena tuntutan ekonomi, tetapi bubar karena tuntutan kultural. Demikian pula Presiden Soeharto secara sepihak membatalkan rencana pembelian F-16 Amerika Serikat dan merintis pembelian Sukhoi dari Rusia atas alasan yang mirip.

Namun dengan Camdessus (IMF), Presiden Soeharto sempat terjebak dan terdikte, beliau sendiri saya perkirakan menyesal atas keterdiktean ini, beliau terkecoh oleh para *economic villains*. Dalam mengatasi persoalan kenegaraan, yang kita perlukan adalah teknosof dan politikus negarawan sekaligus. Tatkala IMF hingga saat ini menekan Indonesia dan kaum reformis menolak IMF, para mantan teknokrat Presiden Soeharto ternyata terkesan tetap berpangku tangan sebagai pilihan sikap budaya.

Kita memang menghadapi krisis politik, krisis kepemimpinan dan krisis ekonomi. Lebih dari itu,



sebenarnya kita menghadapi krisis budaya yaitu : krisis jatidiri, krisis harga diri dan krisis kesadaran nasional

Oleh karena itu, mengutip ucapan Daoed Joesoef, pembangunan nasional harus pula berdimensi pembangunan *innerlijke beschaving*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hausmen, Daniel M. 1995. *The Philosophy of Economics*. Cambridge University Press
- Haryadi, D. dan E. Suhendar. 1997. *Replikasi Model Lembaga Ekonomi Rakyat dalam Bisnis Indonesia*, No. 3811/XII
- Kartasasmita, G. 1995. "Pembangunan Ekonomi Rakyat", dalam *Pikiran Rakyat*, No. 225/XXX
- Yunus, M. 1994. "Credit for Self-Employment a Fundamental Human Right", dalam David S. Gibbon (ed). 1994. *Grameen Reader*. Dhaka : Grameen Bank, Mirpur Two